

**PEMBERDAYAAN KELUARGA BERBASIS MASJID PADA
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO BOJONEGORO**

***FAMILY EMPOWERMENT COMMUNITY BASED ON MOSQUE IN SAMIN
COMMUNITY IN JEPANG VILLAGE MARGOMULYO BOJONEGORO***

Siti Dalilah Candrawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Email : judulsj@gmail.com

Sri Warjiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Email : warjiyatisri@gmail.com

Nur Lailatul Musyafa'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Email : shafaadesign@gmail.com

Naskah diterima tanggal 3 Januari 2018. Naskah direvisi tanggal 14 Februari 2018. Naskah disetujui tanggal 18 Mei 2018

Abstrak

Masyarakat Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran *Saminisme*. Ajaran Masyarakat Samin di dusun Jepang, desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari sekian keturunan pengikut ajaran Samin Surosentiko. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah kurang optimalnya pemanfaatan potensi masjid al-Huda sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini menggunakan metode penelitian bersama masyarakat (CBR). Langkah-langkah pendampingan yang dilakukan melalui inkulturasi (pembauran kepada masyarakat secara langsung), *mapping* (baik *mapping* geografis dan sosial untuk memetakan kondisi fisik dan sosial masyarakat dampingan), pengorganisasian dalam masyarakat secara partisipatif, FGD, dan melakukan aksi program dengan mendorong keterlibatan masyarakat kegiatan partisipatoris bersama masyarakat Samin dengan membentuk kelompok untuk program kegiatan BKB, BKR, dan BKL. Hasil keputusan FGD di antaranya mengajak kader PLKB dan muballigh dusun Jepang sebagai stake holder agar dalam setiap kegiatan ceramah dan agenda dakwah menggunakan substansi materi tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam Islam. Setelah melalui FGD, juga melalui kesepakatan bahwa tindak lanjut kegiatan ketahanan keluarga selanjutnya akan dilakukan di masjid secara berkala. Guna kepentingan keberhasilan program kegiatan, perlu dibentuk kelompok BKB, BKR, dan BKL dan peningkatan keterampilan konselornya. Tujuan dari penelitian ini tercapai yakni masyarakat tidak hanya menggunakan sarana masjid dan menambah daya guna masjid sebagai fasilitas ibadah tetapi juga komponen fasilitas sosial.

Kata kunci : masyarakat Samin, pemberdayaan keluarga, potensi masjid, riset berbasis komunitas

Abstract

Samin community is a group of people who embrace the teachings of Saminisme. Issues of this research is less than optimal utilization of the potential for al-Huda mosque as a place of social activities. The strategy used in this research using community based research. Steps mentoring done through inculturation, mapping, community organizing participatory, FGD, and action programs. The results of the FGD's decision together persuade the coach of PLKB and Jepang village's muballigh as stakeholders so that in every agenda activity of da'wah use material substance about family resilience in Islam. After going through the FGD, also through an agreement for the next activities to be performed in the mosque on a regular basis. The purpose of this

study is reached that the community not only use the mosque facilities and increase the use of mosques as a facility of worship but also the components of social facilities.

Keywords: *Samin community, family empowerment, potential mosque, community based research*

PENDAHULUAN

Masyarakat Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran ini berasal dari seorang tokoh bernama Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randublatung, Blora. Ajaran Saminisme muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Masyarakat Samin dikenal memegang prinsip kejujuran dengan teguh, yang bertujuan mencegah menyakiti orang lain.

Ajaran Masyarakat Samin di dusun Jepang, Desa Margomulyo, kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari sekian keturunan pengikut ajaran Samin Surosentiko. Saat ini di dusun Jepang, masih ada sekitar 47 KK masyarakat Samin yang hidup berkelompok. Masyarakat Samin yang dulunya terisolasi dari dalam, sejak tahun 1990 mulai terbuka dengan masyarakat luar. Selain berdirinya sekolah dasar sebagai tonggak pendidikan, program pemerintah baik fisik, sosial maupun budaya terus mengalir ke Dusun Jepang sebagai wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat Samin.

Samin disebut juga agama Adam, sebab ajaran Saminisme yang terwariskan hingga kini mencuatkan nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan dan kerja keras. Di jaman order baru, agama Adam tersebut dianggap aliran komunis sehingga melalui program pemerintah Bojonegoro, masyarakat Samin diajak memeluk agama Islam meskipun hanya sebatas Islam KTP atau abangan. Dimulai dari pernikahan masal tahun 1967, hingga gencarnya program pembangunan dan fasilitas keagamaan. Saat ini tercatat dusun Jepang memiliki sebuah masjid yakni masjid al-Huda dan tiga buah mushala.

Masjid al-Huda tercatat memiliki luas tanah 300 m² dan luas bangunan 200 m². Meski sudah berusia lebih dari seperempat abad, namun penggunaan masjid al-Huda belum optimal. Shalat jama'ah yang rutin dikerjakan oleh masyarakat Samin di dusun Jepang adalah shalat Maghrib dan Isya, serta shalat Jum'at. Selebihnya masjid menjadi kosong, kecuali ada peringatan hari besar Islam.

Sepinya kegiatan masjid bertolak belakang dengan potensi besar masjid al-Huda sebagai pusat peradaban umat Islam. Potensi tersebut di antaranya: Pertama, seluruh masyarakat Samin menganut agama Islam meski masih abangan, Kedua : adanya tokoh agama/muballigh yakni Bapak Muhammad Miran, lulusan Pondok Pesantren Pabelan Magelang dan istrinya Bu Maslachah yang merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ketiga : adanya kegiatan pengajian yang baru dimulai rutin setahun lalu dan dimotori oleh tokoh agama beserta guru Raudlatul Anfal (RA) di dusun Jepang. Hanya saja, pengajian rutin itu tidak dilakukan di masjid, namun keliling ke rumah warga dan juga dilakukan di RA sekaligus dengan pertemuan wali murid.

Keberadaan masjid tentunya menjadi nafas bagi kehidupan spiritual, sosial dan kultural umat Islam. Islam menempatkan masjid sebagai tempat strategis dalam bidang sosial, pendidikan dan pemersatu umat. Selain menjadi poros aktivitas keagamaan di masyarakat, masjid diharapkan pula menjadi mitra lembaga pendidikan formal (sekolah) yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi yang akan datang. Masjid seharusnya dapat dioptimalkan fungsinya sebagai ruang publik dan pusat pembinaan keluarga.

Masyarakat Samin kurang memiliki akses informasi mengenai pola-pola pembinaan keluarga balita, pembinaan keluarga remaja dan pembinaan keluarga lansia. Akses informasi tentang keluarga berencana masih sulit karena jumlah kader Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang terbatas. Pola budaya masyarakat Samin masih bergantung pada instruksi tokoh masyarakat sentral, sehingga tanpa adanya dukungan tokoh masyarakat sentral, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan. Selain itu, terdapat dampak yang problematis dalam keluarga di dusun Jepang yakni : pernikahan dini, minimnya perhatian terhadap gizi lansia, etika pergaulan remaja atau pranikah.

Model pembinaan keluarga yang digunakan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat Samin adalah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL). Tiga model pembinaan ini merupakan program pemerintah yang berfokus pada ketahanan keluarga. Pembinaan ini telah berjalan di dusun

Jepang, namun belum ada dalam agenda kegiatan masjid al-Huda. Dengan menerapkan model pembinaan keluarga yang dilaksanakan di dalam masjid, maka diharapkan dapat menciptakan pembangunan masyarakat berbasis masjid. Artinya masjid al-Huda dapat menjadi optimal fungsinya sebagai ruang publik dan menjadi dekat dalam keseharian hidup masyarakat Samin.

Peluang atau potensi pemberdayaan keluarga di masyarakat Samin adalah sudah tersedianya sarana masjid Al-Huda sebagai basis berkumpulnya masyarakat untuk ibadah yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pemberdayaan keluarga dalam konteks bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL).

Isu dan fokus penelitian terkait pembinaan keluarga BKB, BKR dan BKL adalah isu pertama : masyarakat kurang responsif terhadap program-program pemerintah tentang kependudukan, isu kedua : masyarakat kurang peduli terhadap program keluarga sejahtera yang berdampak pada minimnya keterlibatan masyarakat pada program BKB (Bina Keluarga Balita), BKR(Bina Keluarga Remaja) dan BKL(Bina Keluarga Lansia) dan isu ketiga : kurang maksimalnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pentingnya ketahanan keluarga. Hal ini menyebabkan masyarakat Samin belum tergerak untuk membentuk BKR dan BKL. Ketiga isu ini menjadikan problem di masyarakat Samin terhadap transformasi pengetahuan keislaman dan kesejahteraan keluarga terhadap BKR dan BKL.

Dari berbagai isu tersebut, maka sangat penting melakukan pendampingan untuk mewujudkan program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Tujuan penelitian yang dicapai dalam segi spiritual adalah mengoptimalkan fungsi masjid yang sebelumnya hanya sebagai tempat ibadah dan perayaan hari besar Islam menjadi sarana kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid dapat memfasilitasi pemberdayaan keluarga terkait wawasan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL). Tujuan penelitian dalam segi sosial adalah untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat Samin di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro tentang wawasan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL).

Tinjauan Pustaka

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan (Widayanti, 2012: 89-90).

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh staf pengajar UGM tersebut intinya meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Sulistiyani, 2004: 77).

Pembangunan manusia yang dicanangkan sebagai titik sentral pembangunan nasional bukanlah semata-mata untuk mensukseskan pembangunan tetapi justru pembangunan itu sendiri harus ditujukan untuk manusia. Oleh karena sumber daya manusia bukan hanya sarana untuk memikul beban pembangunan, tetapi harus merupakan sasaran utama dari pembangunan. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat, sebagai dikutip Agus Purbatin, jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Hadi, 2009: 2).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Hadi, 2009: 2).

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke

dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi (Hadi, 2009: 2).

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Hadi, 2009: 3).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang,

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Hadi, 2009: 4).

Yang menarik dari pengertian pemberdayaan tadi adalah di sana ada sebuah proses. Pengertian proses itu berarti menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik *knowledge*, *attitude*, maupun praktik menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.

Dari pengertian di atas maka dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Selanjutnya dengan memahami pengertian pemberdayaan dan tahapan-tahapannya maka dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian itu meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat agar tercapai kemandirian. Maka keluarga sangatlah penting sebagai lingkup unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dalam hal ini adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang memiliki

anak balita, atau memiliki anak remaja dan atau memiliki anggota keluarga lansia, belakangan diartikan dengan semua dan setiap orang yang ada dalam sebuah keluarga/rumah tangga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2). Dengan demikian maka bisa dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid pengertiannya adalah proses untuk menjadikan masyarakat desa itu mandiri dengan mengambil pusat kegiatan di masjid.

Masjid

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan bangunan tempat berkumpul umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai suatu kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh umat manusia. Masjid sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, tapi juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan (Quraish Shihab, 1996: 462).

Moh. E. Ayub mengemukakan paling sedikit ada sembilan fungsi yang dapat diperankan masjid dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat berkonsultasi mengemukakan kesulitan-kesulitan dan meminta bantuan dan pertolongan
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama'ah dan membina kegotongroyongan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
6. Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat
8. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikan
9. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial (yub, 1996: 32)

Melalui masjid, Rasulullah Saw membina kaum muslimin menuju peradaban yang tinggi. Masjid dijadikan pusat pembinaan, pemberdayaan dan

kegiatan. Peranan Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah Saw begitu sentral sehingga menghasilkan perubahan dahsyat. Masyarakat jahiliyah menjadi tercerahkan berkat peran multiguna masjid Nabawi sebagai pusat pengembangan spiritualitas, intelektualitas, dan gerakan sosial masyarakat. Rasulullah Saw pun telah meneladkan bagaimana mendayagunakan masjid untuk kepentingan kesehatan umat dan ketahanan keluarga. Di dalam masjid, beliau sering memperhatikan kesehatan para sahabat, secara spiritual, maupun fisik layaknya seorang dokter.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan pusat ibadah dalam pengertian yang luas, yang mencakup juga kegiatan muamalah. Dalam konteks modern, peran sosial masjid menjadi semakin kompleks selain peran pendidikan, pencerahan, dan perbaikan ekonomi, peran promosi kesehatan, dan peran pembinaan ketahanan keluarga juga harus menjadi prioritas.

Pemberdayaan Komunitas Berbasis Masjid

Pemberdayaan komunitas adalah proses membangun kembali struktur komunitas masyarakat Samin dimana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Samin dusun Jepang menjadi lebih dimungkinkan. Konsep pemberdayaan komunitas dengan berbasis masjid ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap masyarakat Samin dusun Jepang. Komunitas masyarakat Samin dusun Jepang tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis) dan hanya menjadi obyek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan untuk :

- a. Memiliki akses terhadap sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan sistem mata penghidupannya
- b. Ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupan serta keputusan yang mempengaruhi mereka. Kegiatan pemberdayaan komunitas masyarakat adat Samin dalam hal ini adalah sebagai umat Islam yang memiliki potensi, dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap, meningkatkan

kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan.

Proses pemberdayaan komunitas masyarakat Samin melalui pendampingan tersebut secara langsung dapat dilakukan oleh pengelola masjid. Masjid dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penguatan ketahanan keluarga, khususnya di dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jepang Kecamatan Maromulyo, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, kejelian dan ketelatenan dalam pengumpulan data sangat dibutuhkan terhadap keaslian dan objektivitas data.

Pendampingan ini menggunakan metode penelitian bersama masyarakat (*Community Based Research*, CBR) untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. *Community-based research* didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*sosial action*) dan perubahan sosial (*sosial change*) dengan model *affirmative action* dengan menggunakan budaya lokal sebagai jembatan mewujudkan perubahan wawasan, kesadaran, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendampingan. (Tim Penyusun Panduan CBR UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015: 8)

Langkah-langkah pendampingan dilakukan sebagai berikut:

1. Inkulturasi (Pembauran kepada masyarakat secara langsung)
2. *Mapping* (baik mapping geografis dan sosial untuk memetakan kondisi fisik dan sosial masyarakat dampingan)
3. Pengorganisasian masyarakat secara partisipatif
4. FGD (*Focus Group Discussion*)
5. Aksi Program; melakukan kegiatan partisipatoris bersama masyarakat Samin membentuk program kegiatan dan membentuk kelompok BKB, BKR dan BKL

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama, sedangkan data sekunder merupakan pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, kuisioner dan FGD. Wawancara dilakukan kepada BKKBN kota Bojonegoro, PLKB desa Margomulyo, PLKB desa Margomulyo, pegawai kecamatan Margomulyo, tokoh agama dan tokoh masyarakat dusun Jepang, khususnya tokoh sentral Mbah Harjo. dan lembaga-lembaga lain yang erat hubungannya dengan masalah pemberdayaan keluarga. Pemilihan aktor/tokoh/masyarakat Samin yang akan diwawancara dilakukan secara *snowballing system*, artinya informan berikut yang dipilih didasarkan atas informasi dari informan sebelumnya. Informan yang dipilih tidak dibatasi jumlahnya, asalkan data yang dicari dikategorikan 'cukup' maka wawancara bisa diakhiri. Sebagai antisipasi kesulitan yang dimungkinkan terjadi, terutama ketika harus berwawancara kepada masyarakat Samin (kaum tua) maka tim peneliti merasa penting untuk mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*). Selain itu, teknik FGD ini juga penting dilakukan guna menjangkau data tertentu, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab melalui wawancara. FGD dilakukan dengan melibatkan masyarakat Samin.

Selain wawancara, kuisioner dan FGD, dilakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Samin secara umum setiap hari, melihat aktivitas atau kegiatannya, mengamati obyek-obyek penting (lingkungan, tempat tinggal, lahan pertanian, dan tempat ibadat) yang menjadi bagian vital bagi kelangsungan hidupnya.

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan penelitian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya, misal yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga berbasis masjid dan tribina ketahanan keluarga yakni BKB, BKR dan BKL, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Langkah studi pustaka menjadi penting untuk melengkapi data yang tidak bisa diperoleh dari pengamatan maupun wawancara.

PEMBAHASAN

Profil Dusun Jepang, Tempat Tinggal Masyarakat Samin

Dusun Jepang, tempat tinggal masyarakat Samin, terletak di bagian barat desa sekitar 1 Km dari Balai Desa Margomulyo. Luas wilayah Dusun Jepang 74,733 ha atau 5,6% dari luas Desa Margomulyo. Dari luas tersebut menurut kepala Dusun Jepang menyatakan bahwa seluas 5,250 ha (7,0%) untuk sawah, 30,225 ha(40,5%) berupa tegalan, dan 39,258 ha (52,5%) untuk pekarangan. Dengan demikian kondisi tanah yang berada di Dusun Jepang lebih dari separuhnya untuk pemukiman.

Dusun Jepang dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani, terpisah dari dusun yang lain, dan memiliki topografi 95% datar sampai berbukit, dan 5% berbukit sampai bergunung. Dusun Jepang masuk dalam satu RW (RW 5) dan terbagi dalam dua RT; yakni RT 01 dan RT 02. Akses menuju Dusun Jepang ini cukup mudah, meskipun tidak terdapat sarana angkutan umum yang masuk, dan satu-satunya transportasi umum menuju Dusun Jepang adalah naik ojek. Berkaitan dengan sarana dan prasarana terutama jalan dapat dikatakan sudah baik. Kondisi jalan yang menghubungkan dusun tersebut sudah beraspal walaupun kondisi sebagian sudah rusak, sebagian di paving, bahkan ada juga yang masih berbatu dan tanah, sehingga waktu musim hujan jalan tanah ini kondisinya becek dan licin.

Dusun Jepang terdiri dari dua ratus empat puluh kepala keluarga (240 KK) dan penduduknya berjumlah 787 Jiwa. Mayoritas masyarakat Dusun Jepang adalah petani dan buruh tani(M. Desayanto Riski Setiawan, 2015: 52-53). Sejak adanya sekolah tersebut penduduk lebih mudah untuk mengakses pendidikan yang sebelumnya Sekolah Dasar terdekat terdapat di Desa Margomulyo. Di Dusun Jepang sebagian besar penduduknya termasuk dalam kelompok dan kategori usia produktif yakni sebanyak 584 orang atau 74,2%. Kemudian usia belum dan sudah tidak produktif sebanyak 203 orang atau 25,8%. Penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan yang belum dan sudah tidak produktif (Siti Munawaroh, Ariani Christiyati, Suwarno, 2015: 28).

Menurut pengakuan informan masyarakat Samin, pada umumnya petani bukan menggarap lahan milik sendiri tetapi tanah milik perhutani. Istilah setempat adalah *baon*, *magersari*, dan ada juga yang mengatakan *pesanggem*. Jadi, para petani dusun Jepang memiliki ketergantungan yang tinggi

dengan perhutani. Besarnya masyarakat Dusun Jepang yang juga memiliki sampingan hewan ternak terutama sapi dan kambing, menurut informan bahwa kebiasaan memiliki hewan ternak selain kotorannya dibuat pupuk kandang juga sebagai tabungan bila sewaktu-waktu membutuhkan, seperti di saat musim kemarau atau *paceklik*. Selain hal tersebut, kebiasaan masyarakat Dusun Jepang bertani serta memelihara ternak, karena pakan ternak sangat mudah didapatkan yakni bisa diperoleh dari tanamannya sendiri dan bisa mencari di sekitar hutan. (Siti Munawaroh, Ariani Christiyati, Suwarno, 2015: 30)

Penduduk Dusun Jepang sebagian besar atau mayoritas jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Hal ini karena sarana dan prasarana pendidikan yang ada hanya TK dan SD. Selain itu faktor penyebabnya adalah ada yang menyatakan karena masalah ekonomi, yakni kurangnya atau ketiadaan dana. Hal ini karena untuk ke tingkat SLTP ke atas harus pergi ke luar dusun yakni di Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngraho, bahkan hingga ke Kabupaten Ngawi, sehingga memerlukan fasilitas atau sarana transportasi seperti harus menggunakan sepeda atau sepeda motor (menambah biaya). Pada tahun 2013 pendidikan setingkat SLTA hanya ada di ibukota kecamatan, itupun berupa SMK, sehingga pada tahun 2015 sekolah tersebut baru bisa meluluskan siswanya. (Siti Munawaroh, Ariani Christiyati, Suwarno, 2015: 31-32)

Ajaran Masyarakat Samin

Masyarakat Samin merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tatanan sendiri serta adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. (Bekti Setio Astuti, 2014: 37) Masyarakat Samin menganut ajaran *Saminisme*. Ajaran *Saminisme* muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Perlawanan mereka dilakukan tidak secara fisik, tetapi berwujud pertentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap pemerintahan Belanda saat itu, seperti menolak membayar pajak, menolak kerja bakti memperbaiki jalan dan menolak ronda malam. (Moch. Rosyid, 2010: 80-82)

Pokok-pokok ajaran Samin yang menjadi bagian dari kearifan lokal antara lain:

a. *Agama iku gaman, Adam pangucape, man gamang lanang* (Agama adalah senjata atau pegangan hidup)

- b. *Aja drengki srei, tukar padu, dahpen, kemeren. Aja kutil jumput, bedhog nyolong* (jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati. Jangan suka mengambil milik orang lain)
- c. *Sabar lan trokal empun ngantos drengki srei, empun ngantos riyo sapada, empun nganti pek-pinepek, kutil jumput bedhog nyolong. Napa malih bedhog oolong, napa milik barang, nemu barang teng dalam mawon kulo simpangi* (Berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang, jangan takabur, jangan mengambil milik orang lain. Apalagi mencuri, mengambil barang. sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan di jauhi).
- d. *Wong urip kudu ngerti uripe, sebab urip siji digawa salawase* (manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup sama dengan roh hanya satu dan dibawa abadi selamanya)
- e. *Wong enom mati uripe titip sang urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih. Kedah sabar lan trokal sing diaran turun temurun. Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong salawase sepisan dai wong selawase dadi wong.* (Bila ada anak muda meninggal, maka hidup (sukma, roh) –nya dititipkan pada sukma (roh) yang hidup. Sewaktu bayi lahir telanjang sdan mengeluarkan suara nger hal itu suatu petanda bahwa sukma bertemu dengan tubuhnya. Oleh karena itulah sukma (roh) orang itu tidak meninggal, hanya menanggalkan pakaiannya. Manusia hidup haruslah mengejar kesabaran dan tawakal terus menerus. Jadi sukma (roh) itu tidak mati, melainkan berkumpul dengan sukma (roh) lain-lainnya yang masih hidup. Sekali orang berbuat kebaikan selamanya dia akan menjadi orang baik).
- f. *Dhek jaman Landa niku njaluk pajek boten trima sak legane nggih boten diwehi. Bebas boten seneng. Ndadani rattan nggih bebas. Gak gelem wis dibebasake. Kenek jagaya orang nyang. Jaga omahe dhewe. Nyengkah ing Negara telung tahun dikenek kerja paksa.* (Pada jaman pemerintah Kolonial belanda pembayaran pajak bukan didasarkan pada sukarela, tapi atas dasar paksaan (ditentukan besarnya), sehingga orang-orang Samin tak mau membayarnya. Mereka tak senang. Memperbaiki jalan juga tak mau. Mereka juga tak senang. Perintah ronda malam juga ditolaknya. Lebih baik menjaga rumahnya

sendiri. Berselisih pendapat dengan pemerintah Kolonial Belanda dikenai kerja paksa).

- g. *Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pengucapane saka sanga bundhelane ana pitu.* (Dalam berbicara kita harus menjaga mulut, hal ini diibaratkan bagai orang berbicara dan angka lima yang berhenti pada angka tujuh dan dari angka Sembilan berhenti pada angka tujuh juga. Angka tujuh memegang peranan penting untuk pegangan sebab angka ini terletak ditengah-tengah antara angka lima dan sembilan).
- h. *Wit jeng nabi kula lanang damel kula rabi tata jeneng wedok pengaran Sukini kukuh dhamen janji buk bikah mpun kula lakoni.* (Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. Kali ini mengawini seorang perempuan bernama Sukini. Saya berjanji setia padanya. Hidup Bersama telah kami jalani berdua). (Suyami, 2007: 29)

Orang luar Samin sering menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, tidak suka mencuri, menolak membayar pajak, dan acap menjadi bahan lelucon terutama di kalangan masyarakat Bojonegoro. Pokok ajaran Samin Surosentiko, yang nama aslinya Raden Kohar, kelahiran Desa Ploso Kedhiren, Randublatung, tahun 1859, dan meninggal saat diasingkan ke Padang, 1914. Pengikut ajaran Samin mempunyai lima ajaran yaitu tidak bersekolah, tidak memakai peci, tapi memakai "iket", yaitu semacam kain yang diikatkan di kepala mirip orang Jawa dahulu, tidak berpoligami, tidak memakai celana panjang, dan hanya pakai celana selutut, tidak berdagang, dan penolakan terhadap kapitalisme. Menurut Samin, perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "*Atmaja (U)Tama*" (anak yang mulia).

Agama Masyarakat Samin

Perlu diketahui, agama yang dianut oleh seluruh masyarakat Dusun Jepang dari data catatan kepala dusun (787 orang) adalah menganut agama Islam. Besarnya masyarakat yang menganut agama Islam, karena tersedianya prasarana dan tokoh agama/mubaligh (Muhammad Miran lulusan dari Pondok Pesantren Pabelan Magelang). Prasarana (langgar) dibangun tahun 1989 kemudian menjadi masjid tahun 1993 yang diberi nama Masjid Al-Huda. Masjid al-Huda memiliki luas tanah 300 m² dan luas bangunan 200 m² Daya tampung masjid al-Huda sebanyak 100 jamaah.

Namun demikian, komunitas masyarakat Samin mempunyai kepercayaan tersendiri, yakni

Agama Adam. Informasi dari selaku ketua adat Samin (Mbah Hardjo Kardi) Agama Adam adalah agama kawitan dan ini dijadikan dasar pokok dalam hidupnya. Maksudnya agama *ikugaman* adalah senjata, *gaman lanang* adalah senjata laki-laki, adam *pangucape* bermakna ketika seseorang hendak melakukan persetubuhan harus dimulai dengan "jawab" pada waktu perkawinan, dan *damelrabi* adalah bahasa dan alat kelamin laki-laki yang kemudian sebagai alat melakukan hubungan antar manusia (laki dan perempuan) (Mbah Hardjo Kardi, Wawancara, 9/10/2016).

Perjalanan masuknya Islam pada masyarakat Samin dimulai pada masa orde baru. Kebijakan pemerintah tentang kehidupan beragama memiliki andil yang besar. Setelah peristiwa 30 September 1945, masyarakat Samin dianggap sebagai penganut aliran komunisme karena pandangan bahwa semua manusia adalah sama. Oleh karena itu, Departemen Agama RI melakukan berbagai pendekatan, di antaranya melakukan pembinaan dan mengajak untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat Samin yang memeluk agama Islam, meskipun hanya sebatas Islam KTP atau abangan. Perubahan besar ini diawali dengan adanya pernikahan masal melalui KUA di dusun Jepang pada tahun 1967. Bagi masyarakat Samin, pernikahan ini merupakan wujud komitmen mereka mematuhi peraturan pemerintah melalui Departemen Agama.

Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Samin

Pemberdayaan keluarga pada masyarakat yang berkaitan dengan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia telah dilakukan pemerintah setempat untuk masyarakat Samin. Untuk mengetahui kondisi pemberdayaan keluarga masyarakat Samin di dusun Jepang dan menggali pengetahuan masyarakat Samin mengenai bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, peneliti membagikan kuisioner dua kali: Pertama, saat pengajian wali murid PAUD RA dan kedua, saat pengajian rutin ibu-ibu yang diadakan tiap Kamis pahing. Pembagian dan pengumpulan kuisioner dilakukan pada waktu yang sama. Pengolahan data kuisioner menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui jumlah atau frekuensi dari item pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuisioner untuk wali murid atau peserta pengajian Ibu-ibu majlis taklim sebanyak 55 responden, dilakukan analisis dari segi karakteristik responden, kondisi real pemberdayaan keluarga dan

pengetahuan responden mengenai manfaat dan penerapan tribina dalam keluarga.

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Responden berjumlah 55 orang dan semuanya berjenis kelamin perempuan berusia 18-65 tahun, dengan pendidikan terakhir mayoritas merupakan lulusan SD.

b. Pekerjaan Responden

Dari 55 responden 29 orang bekerja sebagai petani, 1 orang dagang, 1 orang tani dan dagang, swasta 7 orang dan tidak bekerja 17 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka profesi responden kebanyakan adalah petani (52,73%).

c. Keluarga Balita Responden

Di antara 55 responden, hanya 20 responden yang mempunyai balita

d. Keluarga Remaja Responden

Di antara 55 responden, 29 responden mempunyai remaja.

e. Keluarga Lansia Responden

Di antara 55 responden, 10 responden mempunyai lansia.

2. Kondisi Pemberdayaan Keluarga

a. Urgensi Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja Dan Lansia)

Mayoritas responden (94,55% dari 55 responden) sepakat bahwa program pembinaan keluarga balita, remaja dan lansia adalah program yang penting dan dibutuhkan.

b. Peran Penyuluh Lapangan KB

Mayoritas penyuluh (58,8% dari 55 responden) sepakat bahwa penyuluh lapangan KB telah berperan aktif dalam sosialisasi tribina di dusun Jepang.

c. Pelaksanaan Tribina

Mayoritas responden (78,17% dari 55 responden) menyatakan bahwa pelaksanaan tribina berjalan dengan baik. Setelah dilakukan wawancara kepada sebagian responden secara acak, diketahui bahwa tribina yang berjalan baik adalah bina keluarga balita. Artinya tribina dikatakan berjalan baik bukan dari keseluruhannya yang berjalan baik, namun ada salah satu atau sebagai program yang berjalan aktif dalam meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat Samin.

d. Sarana Dan Prasarana Tribina

Dapat diketahui bahwa mayoritas responden (61,82% dari 55 responden) setuju bahwa sarana prasarana tribina sudah memadai, dalam artian sarana prasarana tribina sudah mencukupi

kebutuhan tribina di masyarakat Samin dusun Jepang.

e. Peran Dinas Kesehatan

Mayoritas responden (78,18% dari 55 responden) setuju bahwa dinas kesehatan kurang berperan dalam melakukan penyuluhan program tribina di masyarakat Samin dusun Jepang.

f. Frekuensi Penyuluh Lapangan KB dalam Penyuluhan Tribina

54,55% dari 55 responden berpendapat bahwa penyuluh lapangan KB kadang-kadang melakukan penyuluhan. Dalam artian penyuluhan tribina kurang dilakukan rutin oleh penyuluh lapangan KB.

g. Posyandu berjalan baik

76,36% dari 55 responden sepakat bahwa posyandu berjalan baik di dusun Jepang. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian responden, penyuluh lapangan KB serta kepala dusun diketahui bahwa posyandu di dusun Jepang rutin berjalan tiap tanggal lima awal bulan di aula dekat rumah bapak kepala dusun.

h. Responden rutin mengikuti Posyandu

Responden yang aktif mengikuti Posyandu sebesar 38,18%. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat Posyandu telah dirasakan orang banyak sehingga tujuan pembinaan keluarga balita bisa tercapai.

i. BKR berjalan baik

Mengenai perwujudan bina keluarga remaja (BKR) di dusun Jepang, mayoritas responden (54,55%) setuju bahwa bina keluarga remaja berjalan baik. Nilai ini lebih sedikit dibandingkan jumlah responden yang setuju bahwa bina balita berjalan baik. Artinya program bina keluarga remaja belum seoptimal program bina keluarga balita. Menurut wawancara dengan sebagian responden, program bina keluarga remaja yang ada di dusun Jepang terwujud dalam karawitan seni budaya di balai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bina keluarga remaja di dusun Jepang lebih ditekankan pada seni, tidak pada pendidikan remaja dan pranikah.

j. BKL berjalan baik

Mayoritas responden (87,28%) setuju bahwa bina keluarga lansia tidak berjalan baik. Nilai ini paling sedikit dibandingkan jumlah responden yang setuju bahwa bina keluarga remaja atau bina keluarga balita berjalan baik. Menurut wawancara terhadap sebagian responden, tidak pernah ada kegiatan lansia seperti cek kesehatan atau berobat gratis.

- k. Ada penyuluhan BKL
Mengenai penyuluhan bina keluarga lansia (BKL) di dusun Jepang, mayoritas responden (83,64%) setuju bahwa penyuluhan BKL tidak pernah ada. Jika pun ada yang pernah mendapat penyuluhan, responden tersebut pernah menjadi kader tribina yang mendapatkan penyuluhan di tingkat di atas dusun, yakni di tingkat desa.
- l. Jumlah Responden mengikuti tribina
Sebanyak 56,37% responden pernah mengikuti bina keluarga balita, sebanyak 3,64% pernah mengikuti bina keluarga remaja dan 0% pernah mengikuti bina keluarga lansia. Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, bina keluarga balita sudah dirasakan luas oleh masyarakat Samin yang diwakili oleh responden. Kedua, bina keluarga remaja dan lansia masih perlu ditingkatkan di dusun Jepang karena masih rendahnya partisipasi masyarakat Samin.
- m. Sumber informasi penyuluhan tribina
Mayoritas responden (20%) mendapat info tribina dari perkumpulan (arisan). Responden sebanyak 58,2% tidak menjawab, yang menjelaskan bahwa responden masih minim mendapatkan penyuluhan terkait tribina. Dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tribina telah ada di dusun Jepang, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
- n. Peran masjid sebagai corong informasi tribina
Mayoritas responden (65,45%) menganggap bahwa masjid berperan dalam mensosialisasikan info penyuluhan di dusun Jepang. Ketika dilakukan wawancara kepada sebagian responden, peran tersebut baru berjalan ketika tim peneliti mengadakan penyuluhan tribina ke dalam masjid. Artinya, masjid sebenarnya belum berperan penuh.
- o. Frekuensi responden mengikuti pengajian
Mayoritas responden (72,73%) aktif mengikuti pengajian. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat partisipasi responden terhadap kegiatan keagamaan cukup tinggi.
- p. Materi dakwah pengajian memuat ketahanan keluarga
Mayoritas responden (74,55%) sepakat bahwa pengajian pernah membahas terkait ketahanan keluarga.
- q. Dukungan tokoh agama atau tokoh masyarakat terhadap tribina
Pendapat Responden Terkait Dukungan TOGA TOMAS pada Tribina Mayoritas responden (94,55%) sepakat bahwa ada dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat pada kegiatan tribina di dusun Jepang.
- r. Sarana masjid memadai untuk tribina
Mayoritas responden (80%) setuju bahwa masjid layak dijadikan sebagai tempat kegiatan tribina untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
3. Pengetahuan Responden Terkait Tribina
- a. Manfaat Bina Keluarga Balita
Manfaat yang paling dirasakan oleh responden adalah terpantaunya gizi anak (36,36%) , menambah ilmu (36,36%) serta kesehatan anak terjaga (34,55%). Hal ini menunjukkan bina keluarga balita membawa manfaat yang banyak pada masyarakat Samin dusun Jepang, yang diwakili oleh responden. Contoh penerapan Bina Keluarga Balita di rumah: Menjaga kesehatan anak, memberi vitamin, membimbing anak, mendidik agama, mendidik sikap, mengikuti posyandu, menjaga pola makan, pemberian ASI eksklusif. Penerapan BKB paling banyak yang dilakukan oleh responden adalah menjaga pola makan (34,55%) dan membimbing anak (30,91%). Hal ini menunjukkan responden mampu menerapkan bina keluarga balita di rumah
- b. Manfaat Bina Keluarga Remaja:
Manfaat yang paling dirasakan oleh responden adalah bisa membimbing remaja (14,55%). Hal ini menunjukkan bahwa responden merasakan manfaat yang cukup dari bina keluarga remaja. Contoh penerapan Bina Keluarga Remaja di rumah: Melakukan pendidikan akhlak, menasehati pergaulan yang baik, mendisiplinkan anak dalam belajar, mendisiplinkan anak dalam bekerja, menumbuhkan kebiasaan anak untuk menolong orang tua, mendidik agama, dan mengajak anak ikut karang taruna. Penerapan BKR paling banyak yang dilakukan oleh responden adalah mendisiplinkan anak dalam belajar (14,55%). Hal ini menunjukkan responden mampu menerapkan bina keluarga remaja di rumah
- c. Manfaat Bina Keluarga Lansia:
Manfaat yang paling dirasakan oleh responden adalah bisa merawat orang tua (3,64%) dan mengetahui cara menjaga kesehatan lansia (3,64%). Hal ini menunjukkan bahwa responden merasakan manfaat dari bina keluarga lansia. Contoh penerapan Bina Keluarga Lansia di rumah: Memberi kasih sayang, memberi pengarahan, memberi makan tepat waktu, memberi makanan bergizi, memperhatikan kesehatan, dan menyiapkan keperluan orang tua.

Penerapan BKL paling banyak yang dilakukan oleh responden adalah memperhatikan kesehatan lansia (7,27%). Hal ini menunjukkan responden cukup mampu menerapkan bina keluarga lansia di rumah

Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid pada Masyarakat Samin

Dari hasil data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak kondisi yang mendukung tribina. Di antaranya adalah: pertama, responden memahami bahwa program tribina adalah program yang penting dan dibutuhkan. Kedua, sarana prasana memadai, dan ketiga, adanya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sementara itu kegiatan tribina tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama di bina keluarga remaja dan lansia. Hal ini dikarenakan kurang masuknya program bina keluarga remaja dan lansia ke dusun Jepang, terlebih jumlah kader penyuluh yang terbatas dan bergantian. Guna meningkatkan partisipasi program tribina, program tribina dapat dibungkus dalam kegiatan rutin pengajian dan arisan masyarakat Samin. Pengajian dan arisan masih menjadi animo yang tinggi di masyarakat Samin, sehingga diharapkan manfaat tribina dapat dirasakan secara lebih luas di kalangan masyarakat.

Dari hasil pendampingan dan studi lapangan ke lokasi penelitian, didapatkan bahwa keberadaan masjid al-Huda belum dioptimalkan keberadaannya. Faktor yang menyebabkan masjid belum optimal adalah adanya sebuah anggapan dan keyakinan dari tokoh masyarakat sentral yang menyatakan bahwa masjid untuk tempat shalat, bukan untuk kegiatan sosial yang lain. Di sisi lain, tokoh agama sekaligus sebagai ketua takmir masjid dan sekaligus sebagai stakeholder untuk penyebarluasan agama, memiliki perasaan budaya pakewuh jika harus berseberangan dengan tokoh masyarakat sentral. Oleh karena itu, kesenjangan inilah yang kemudian mendasari upaya tim untuk melakukan advokasi dan pendampingan tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan melakukan aktivitas yang lain sebagai media untuk membina ikatan jamaah dan kegotongroyongan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ketahanan keluarga.

Bentuk pendampingan tim peneliti ke Dusun Jepang adalah melakukan pengalihan kegiatan tribina, diawali dengan memindahkan lokasi pertemuan wali murid PAUD RA ke majid, kemudian memusatkan tribina yang dibungkus

kegiatan pengajian di masjid. Hal ini membiasakan masyarakat menggunakan sarana masjid dan menambah daya guna masjid tidak hanya sebagai fasilitas ibadah tetapi juga komponen fasilitas sosial.

Intervensi lain yang dilakukan tim peneliti adalah dengan mendorong takmir masjid beserta pengurusnya dan penyuluh PLKB menggunakan masjid sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader ketahanan keluarga. Hal ini agar menunjang fungsi masjid sebagai tempat untuk melakukan tukar informasi dan berbagai pengalaman dalam pemberdayaan dan kegiatan ketahanan keluarga.

Langkah intervensi selanjutnya yang sudah dilakukan tim peneliti adalah melaksanakan FGD (*Focus Grup Discussion*) bersama komunitas mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Hasil keputusan FGD di antaranya mengajak kader PLKB dan muballigh dusun Jepang yakni Bu Maslachah dan Bu Ummi sebagai stakeholder agar dalam setiap kegiatan ceramah dan agenda dakwah menggunakan substansi materi tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam Islam. Setelah melalui FGD yang dilakukan tim peneliti bersama komunitas, juga muncul kesepakatan bahwa tindak lanjut kegiatan ketahanan keluarga selanjutnya akan dilakukan di masjid secara berkala.

Harapan dalam pemberdayaan masjid ini adalah masjid al-Huda bisa berperan dalam mengoordinir masyarakat komunitas Samin guna menyatukan potensi dan pembinaan jamaah. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi takmir masjid dilakukan bina keimanan, ketakwaan, ukhuwah imanilah dan dakwah islamiyah sehingga masjid al-Huda menjadi basis umat Islam yang kokoh. Oleh karena itu agar terlaksana kesinambungan program, perlu dilakukan pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan pelatihan tenaga penggerak/konselor BKB, BKR dan BKL.

Sebagai rekomendasi, terhadap pentingnya pembinaan dan pemberdayaan remaja masjid yang religius, ke depannya perlu dibentuk kelompok remaja masjid sebagai bagian dari optimalisasi fungsi masjid al-Huda dan komunitas masjid yang berkeberdayaan. Keberadaan remaja masjid sangat penting untuk memakmurkan masjid dan membentengi remaja muslim khususnya yang tinggal di sekitar masjid. Keberadaan remaja masjid penting karena masa remaja adalah fase pembentukan yang efektif dan efisien. Remaja masjid dapat memacu soliditas masyarakat

untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Remaja masjid merupakan *entry point* yang tepat untuk perkembangan dakwah. Remaja masjid merupakan kantong pembinaan generasi muda yang berpengaruh positif terhadap akselerasi kebangkitan Islam komunitas masyarakat Samin. Sehingga masjid al-Huda diharapkan bisa berfungsi selain fungsi keagamaan juga fungsi pendidikan, pembinaan, aktualisasi informasi dan sosialisasi.

PENUTUP

Bentuk pendampingan ke Dusun Jepang adalah melakukan pengalihan kegiatan tribina, diawali dengan memindahkan lokasi pertemuan wali murid PAUD RA ke masjid, kemudian memusatkan tribina yang dibungkus kegiatan pengajian di masjid. Hal ini akan membiasakan masyarakat menggunakan sarana masjid dan menambah daya guna masjid tidak hanya sebagai fasilitas ibadah tetapi juga komponen fasilitas sosial

Pendampingan yang dilakukan adalah dengan mendorong takmir masjid beserta pengurusnya dan penyuluh PLKB menggunakan masjid sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kader ketahanan keluarga Langkah advokasi yang dilakukan adalah melaksanakan FGD bersama komunitas mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Hasil keputusan FGD di antaranya mengajak kader PLKB dan muballigh dusun Jepang sebagai stake holder agar dalam setiap kegiatan ceramah dan agenda dakwah menggunakan substansi materi tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam Islam. Setelah melalui FGD, juga melalui kesepakatan bahwa tindak lanjut kegiatan ketahanan keluarga selanjutnya akan dilakukan di masjid secara berkala. Guna kepentingan keberhasilan program kegiatan, perlu dibentuk kelompok BKB, BKR dan BKL dan peningkatan keterampilan konselornya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini melalui proses telaah dan bimbingan oleh para ahli dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selain itu banyak pihak yang telah terlibat sehingga tulisan ini ada di tangan pembaca, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada: Pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pengurus Masjid al-Huda, Masyarakat Samin di desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro, kader petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), Tokoh agama dan tokoh masyarakat

Samin di Margorejo Bojonegoro, Pemerintah desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro, Guru PAUD Raudlatul Anfal dusun Jepang, dan Tenaga penyuluh agama dari KUA desa Margomulyo dan seluruh informan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Bekti Setio. 'Varian Leksikon Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopodhuwur Kabupaten Bolora', CULTURE Vol. 1 No.1 Mei 2014.
- <http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/138957/> diakses tanggal 23 September 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin, diakses pada 11 Oktober 2016.
- Mbah Hardjo Kardi, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Oktober 2016
- Munawaroh, Siti. Ariani, Christiyati. Suwarno. 2015. *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro*. Jakarta: Kemendikbud.
- Purbathin Hadi, Agus. 2009. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya
- Rosyid, Moch. 2010. *Kodifikasi Ajaran Samin*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Setiawan, M. Desayanto Riski. 2015. *Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam: Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suyami. 2007. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Bolora Jawa Tengah*. Yogyakarta: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolora.
- Tim Penyusun Panduan CBR UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. *Community Based Research Panduan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas*. Surabaya: UIN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Widayanti, Sri. 'Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis', Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2012.